ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN ALOKASI BELANJA MODAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Irmawati, Warsito Kawedar
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang
irmaww@students.undip.ac.id[1], warsitokawedar@lecturer.undip.ac.id[2]

Abstrak: Pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Alokasi Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia. Populasi penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, dengan sampel 34 provinsi yang diamati selama periode 2020 hingga 2024, dan menghasilkan total 170 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan uji Spearman Rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, (2) Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, dan (3) Alokasi Belanja Modal juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Temuan ini mengindikasi bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam optimalisasi PAD dan pemanfaatan Dana Perimbangan, perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di setiap provinsi Indonesia.
Kata Kunci: Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kesejahteraan Masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract: *Human development and community welfare are fundamental goals of regional development. This study aims to analyze the effect of the Balancing Fund, Regional Original Income (PAD), and Capital Expenditure Allocation on Community Welfare as measured by the Human Development Index. The research population comprises all provinces in Indonesia, with a sample of 34 provinces observed from 2020 to 2024, resulting in a total of 170 samples. The data analysis method used is quantitative with a Spearman Rank test approach. The research results show that (1) Balancing Fund has a positive and significant effect on Community Welfare. (2) Regional Original Income has a positive and significant effect on Community Welfare, and (3) Capital Expenditure Allocation also has a positive and significant effect on Community Welfare. These findings indicate that regional financial management policies, particularly in optimizing PAD and utilizing the Balancing Funds, need to be directed towards improving the quality of human development in each province in Indonesia.*
Keywords: *Balancing Fund, Regional Original Income, Capital Expenditure, Community Welfare, Human Development Index*

ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator utama dalam menilai kesuksesan suatu pembangunan nasional. Setiap negara menjadikan pembangunan manusia yang berfokus pada peningkatan taraf hidup sebagai tujuan utama. Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001, Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen kebijakan fiskal melalui mekanisme desentralisasi. Musgrave dan Musgrave (1989), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal diakui secara luas sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah atau negara.

Teori *fiscal federalism* yang dikemukakan oleh Oates (1972), menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang signifikan. Pemerintah daerah memiliki otonomi fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta alokasi transfer dana pusat dalam menyediakan fasilitas dan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bahl dan Bird (2018), pendekatan tersebut diyakini mampu mendorong efisiensi dalam alokasi sumber daya publik dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup mekanisme pengalokasian transfer ke daerah, pengelolaan belanja, juga pembagian kewenangan untuk pembiayaan daerah. Hal ini selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, pemerintah daerah diberi peluang untuk melakukan eksplorasi terhadap potensi lokal serta meningkatkan performa keuangan daerah guna mencapai kemandirian fiskal. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme)* dalam *Human Development Report* (1990), pembangunan manusia memiliki hubungan yang positif dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat terlihat dari peningkatan capaian pendidikan, kesehatan yang lebih baik, serta kemandirian di bidang ekonomi. Salah satu pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengukur pembangunan dan menekankan pada perluasan pilihan masyarakat yang meliputi tiga indikator, yaitu aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas pembangunan manusia sebagai prioritas utama dalam strategi pengurangan kesenjangan daerah. Kebijakan ini sejalan dengan kerangka

ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

pembangunan nasional dalam visi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Berdasarkan unggahan di situs Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada Maret 2025, visi tersebut menetapkan tiga sasaran strategis pembangunan nasional. Adapun sasaran-sasaran tersebut mencakup, penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai 4,5-5 persen, peningkatan kualitas sumber daya manusia tumbuh sebesar 0,59, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan capaian sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia tahun 2020-2024?

Teori *Fiscal Federalism*

Teori ini menjelaskan tentang desentralisasi fiskal yang merupakan pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi alokasi dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal mengacu pada mekanisme distribusi kewenangan fiskal yang mencakup alokasi pendapatan, pengelolaan belanja, serta transfer antar tingkat pemerintahan (Oates, 1972).

Desentralisasi fiskal menganut prinsip dasar '*money follow function*' yaitu harmonisasi antara delegasi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan *(expenditure assignment)* dan sumber pendapatan *(revenue assignment)* kepada pemerintah daerah. Musgrave (1959) menjelaskan bahwa pengelolaan stabilitas ekonomi makro serta pemerataan distribusi pendapatan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat.

Kesejahteraan Masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa setiap keadaan di mana setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan baik fisik, mental, maupun sosialnya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah tercermin dari adanya penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, capaian pendidikan yang lebih tinggi, serta peningkatan produktivitas masyarakat (Todaro & Smith, 2006).

UNDP (2020) menegaskan bahwa IPM dirancang untuk mentransformasi paradigma pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan yang berorientasi pada

ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

manusia. Secara konseptual, IPM berfungsi sebagai alat ukur komprehensif untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks ini dibangun berdasarkan tiga dimensi. Pertama, angka harapan hidup sebagai proksi kondisi kesehatan. Kedua, indikator pencapaian di sektor pendidikan yang direpresentasikan melalui rata-rata tahun sekolah yang telah diselesaikan serta estimasi lama sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh individu. Ketiga, pendapatan per kapita sebagai indikator tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Berikut merupakan perumusan dalam perhitungan IPM:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

dimana:

1. Indeks Kesehatan $= \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$
2. Indeks Pendidikan $= \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$
3. Indeks Pengeluaran $= \frac{Ln(Pengeluaran) - Ln(Pengeluaran_{min})}{Ln(Pengeluaran_{maks}) - Ln(Pengeluaran_{min})}$

Dana Perimbangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan salah satu komponen dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Alokasi ini bertujuan untuk membantu pemerataan pembangunan daerah dan menjamin kecukupan fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD didefinisikan sebagai sumber penerimaan daerah yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Martinez-Vazquez dan McNab (2003), desentralisasi fiskal dapat memperkuat partispasi masyarakart melalui peningkatan pendapatas daerah dalam proses perencanaan dan pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan produktif dengan manfaat ekonomi jangka panjang. Menurut Mardiasmo (2009), belanja modal diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu tanah, jaringan dan jalan irigasi, bangunan dan gedung, mesin dan peralatan, serta jenis belanja modal fisik lainnya.

ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menganalisis pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta kerangka pemikiran teoritis pada penelitian ini, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

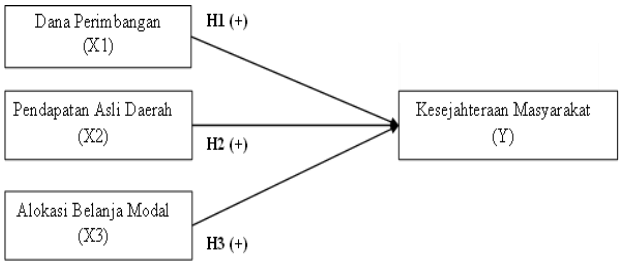

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2025

Dana perimbangan berperan sebagai mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dirancang untuk pemerataan kapasitas fiskal antardaerah, dan memastikan pengelolaan dana bagi pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik. Menurut Oates (1999), pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga pembagian kewenangan yang memadai melalui dana perimbangan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

Penelitian dari Hanantoko (2020) dan Pangestuti *et al.*, (2024) sepakat bahwa dana perimbangan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dimaksimalkan dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh Runtunuwu *et al.* (2023) bahwa alokasi fiskal pusat ke daerah efektif dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga peneliti merumuskan hipotesis penelitian:

H1: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendefinisikan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi wilayah masing-masing. PAD dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Wijaya dan Raharja (2023), PAD dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Pernyataan serupa didukung oleh Mallongi dan Selong (2024) dan Isman *et al.* (2025) bahwa PAD berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Anggaran

ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen fiskal utama dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. APBD berperan sebagai mekanisme alokasi sumber data publik melalui pengelolaan belanja daerah pada program-program strategis untuk percepatan pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat.

Menurut Boling *et al.* (2023) belanja modal pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ajaero *et al.* (2024) dan Tarumingkeng *et al.* (2018) mendukung pernyataan tersebut bahwa daerah dengan proporsi belanja modal yang tinggi berpotensi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Alokasi Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal mencakup dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan alokasi belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh provinsi Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024, dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu berjumlah 34 provinsi dikarenakan pada tahun yang digunakan untuk penelitian beberapa provinsi belum memiliki ketersediaan data yang cukup seperti Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 170 sampel.

Terdapat 3 variabel yang diuji pada penelitian ini, yaitu dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan alokasi belanja modal sebagai variabel independen, kemudian kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikat. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan pengujian model menggunakan regresi linear berganda dengan melakukan analisis regresi data panel dengan bantuan *software* Eviews 12 Version.

Adapun persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Yit = \alpha + \beta 1 DPit + \beta 2 PADit + \beta 3 BMit + eit$$

Keterangan:
Y = Kesejahteraan Masyarakat
α = Konstanta
ß1, ß2, ß3 = Koefisien Regresi
DP = Dana Perimbangan
PAD = Pendapatan Asli Daerah
BM = Belanja Modal
i = *Cross-section*

ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

t = *Time-series*
e = Variabel mengganggu (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, hipotesis diuji menggunakan model regresi linear berganda untuk melihat kebenaran (Ghozali, 2021). Teknik ini menguji bagaimana pengaruh variabel independen yaitu dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan alokasi belanja modal terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat.

Uji Statistik Deskriptif

Pengujian ini dilakukan untuk melihat karakteristik data dan menjelaskan deskriptif objektif mengenai variabel penelitian melalui pengumpulan dan penyajian data (Ghozali, 2021). Tabel 1, menyajikan informasi mengenai hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-rata	Median	Minimum	Maksimum	Std. Deviasi
Dana Perimbangan	170	4.383.894	3.074.149	990.950	19.389.066	3.778.566
PAD	170	5.668.139	2.377.840	368.080	55.661.190	9.860.173
Belanja Modal	170	1.678.666	1.170.775	110.500	18.041.250	2.268.740
IPM	170	73,39	73,38	61,22	84,15	3,58

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2025

Tabel 2. Hasil Uji *Spearman Rank*

Variable	N	Coefficient	Sig.
Dana Perimbangan	170	0,165	0,032
Pendapatan Asli Daerah	170	0,530	0,000
Belanja Modal	170	0,217	0,005
IPM	170	1,000	1,000

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2025

Tabel 3. Hasil Uji Variabel Dimensional Dana Perimbangan

Variable	N	Coefficient	Sig.
DBH	170	0,281	0,000
DAU	170	-0,158	0,040
DAK	170	0,117	0,130
IPM	170	1,000	1,000

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2025

ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

Tabel 4. Hasil Uji Variabel Dimensional Pendapatan Asli Daerah

Variable	N	Coefficient	Sig.
PD	170	0,539	0,000
RD	170	0,418	0,000
HPKD	170	0,451	0,000
LPADS	170	0,247	0,001
IPM	170	1,000	1,000

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2025

Variabel Dana Perimbangan berjumlah 170 sampel dengan nilai terkecil sebesar 990.950 di Provinsi Papua tahun 2024, sedangkan nilai terbesar di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebesar 19.389.066, dan nilai rata-rata sebesar 4.383.894 serta standar deviasi sebesar 3.778.566.

a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah 170 sampel dengan nilai terkecil sebesar 368.080 di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, sedangkan nilai terbesar di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 55.661.190, dan nilai rata-rata sebesar 5.668.139 serta standar deviasi sebesar 9.860.173.
b. Variabel Belanja Modal berjumlah 170 sampel dengan nilai terkecil sebesar 110.500 di Provinsi Gorontalo tahun 2022, sedangkan nilai terbesar di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 18.041.250, dan nilai rata-rata sebesar 1.678.666 serta standar deviasi sebesar 2.268.073.
c. Variabel IPM berjumlah 170 sampel dengan nilai terkecil sebesar 61,22 di Provinsi Papua tahun 2020, sedangkan nilai terbesar di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebesar 84,15, dan nilai rata-rata sebesar 73,38 serta standar deviasi sebesar 3,58.

Uji *Spearman Rank*

Pengujian ini digunakan sebagai metode statistik non-parametrik untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Menurut Doane dan Seward (2020), teknik ini secara khusus tepat digunakan pada data yang bersifat non-parametrik atau ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Pemilihan metode ini didasarkan pada hasil uji normalitas yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal meskipun telah dilakukan transformasi data ke logaritma natural, sehingga pendekatan parametrik seperti regresi linear tidak dapat digunakan secara tepat. Pengolahan data dilakukan menggunakan *software* SPSS 21 dengan hasil pengujian Spearman Rank ditampilkan dalam Tabel 2.

Variabel Dana Perimbangan (DP) memiliki signifikansi 0,032 < 0,05 maka disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari DP ke IPM, sehingga H1 diterima.

ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki signifikansi 0,000 < 0,05 maka disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari PAD ke IPM, sehingga H2 diterima.

b. Variabel Belanja Modal (BM) memiliki signifikansi 0,005 < 0,05 maka disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari BM ke IPM, sehingga H3 diterima.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

Berdasarkan Tabel 2, variabel Dana Perimbangan (DP) menunjukkan tingkat signifikansi 0,032 dan arah positif 0,165. Hal ini menunjukkan variabel DP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM, artinya setiap kenaikan DP dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh perencanaan dan pengelolaan transfer dana ke daerah yang optimal serta pemaksimalan penggunaan dana oleh pemerintah daerah. Studi dari Pangestuti *et al.* (2024) dan Saputra & Witono (2023) mendukung hasil penelitian ini, bahwa dana perimbangan yang dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

Berdasarkan Tabel 2, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan arah positif sebesar 0,530. Hal ini menunjukkan variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM, artinya setiap kenaikan PAD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan PAD melalui inovasi strategis dapat mendorong kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan PAD secara optimal dapat mendorong peningkatan standar pembangunan manusia di suatu daerah. Penelitian Isman *et al.* (2025) dan Boling *et al.* (2023) mendukung hasil penelitian ini, daerah dengan tingkat IPM yang lebih baik cenderung memiliki capaian IPM yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan kemampuan fiskal suatu daerah memungkinkan penyelenggaraan layanan publik secara mandiri dan berkelanjutan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

Tabel 2 menunjukkan tingkat signifikansi variabel Belanja Modal (BM) sebesar 0,005 dan arah positif sebesar 0,217. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM, artinya setiap kenaikan BM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

Pemaksimalan penggunaan belanja modal untuk untuk pembangunan infrastruktur dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui perbaikan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Penemuan dari Ajaero *et al*. (2024) dan Hanantoko (2020) sepakat dengan hasil penelitian ini, bahwa belanja modal yang digunakan untuk sektor kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan berpotensi memperbaiki tingkat IPM yang lebih baik, hal ini mengindikasi bahwa penambahan alokasi belanja modal yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Uji Tambahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Perimbangan diklasifikasikan menjadi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga diklasifikasikan ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD sah. Pengujian ini dilakukan untuk melihat lebih lanjut komponen-komponen mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Masyarakat

   Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan menunjukkan hasil signifikansi 0,000 dan arah positif sebesar 0,281. Hal ini menyimpulkan bahwa dengan kenaikan DBH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat

   Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu bagian dari dana perimbangan memiliki signifikan 0,040 dengan arah negatif sebesar -0,158. Hasil ini menyimpulkan bahwa penerimaan DAU yang semakin tinggi berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat

   Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang menunjukkan signifikansi 0,130 dan arah positif 0,117. Hasil ini menyimpulkan bahwa besar kecilnya alokasi DAK tidak menjadi faktor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

   Pajak daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang memiliki signifikansi 0,000 dengan arah positif sebesar 0,539. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah yang tinggi berpotensi dalam

ISSN: 2622-6529
e ISSN : 2655-1306

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

   Retribusi Daerah salah satu bagian dari pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikansi 0,000 dan arah positif sebesar 0,418. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengelolaan retribusi di Indonesia.

3. Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikan 0,000 dengan arah positif sebesar 0,451. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan hasil kekayaan daerah yang optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

4. Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

   Lain-lain PAD yang Sah (LPADS) adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikan 0,001 dengan arah positif sebesar 0,247. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan lain-lain PAD untuk pelayanan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu;

a. Variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) pada provinsi di Indonesia periode 2020 hingga 2024. Hal ini terjadi karena dengan memaksimalkan penggunaan dana perimbangan yang ditransfer dari pusat berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) pada provinsi Indonesia periode 2020 hingga 2024. Hal ini dapat terjadi karena pemanfaatan PAD dengan melakukan inovasi strategis untuk pembangunan daerah menunjukkan kemandirian fiskal pada daerah tersebut, dimana berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Variabel belanja modal menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di provinsi Indonesia pada periode 2020 hingga 2024. Hal ini dapat terjadi karena belanja modal yang dialokasikan secara optimal untuk pembiayaan infrastruktur seperti sektor pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Saran

a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan ruang

lingkup penelitian di tingkat kabupaten/kota agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek yang diteliti serta menggunakan data lebih lengkap dan terperinci. Perluasan objek dan kelengkapan data bertujuan agar temuan penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih akurat dalam menggambarkan kondisi nyata terkait pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal.

c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat desentralisasi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA.

Ajaero. O. O., Ifeoma, Nwachukwu G., Iheduru. N. G. (2024). Public Expenditure and Human Development in Nigeria. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), Vol VIII(V).

Arif, S., Mallongi, S., & Selong, A. (n.d.). The Influence of Regional Original Income and Balanced Funds on Capital Expenditure and Community Welfare. BALANCE: Jurnal Ekonomi, Vol 20(2), 256-263.

Bahl, R. W., & Bird, R. M. (2018). Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below. Edward Elgar Publishing

Boling. J. M., Apriyanto. G., & Harmono. (2023). PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. Journal of Comprehensice Science.

Doane, D. P., & Seward, L. E. (2020). Applied statistics in business and economics (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education

Ghozali. I., (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26, (Edisi ke-10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanantoko. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. ECONOMIE, 2(2), 120-136.

Isman, M. H. S., Salomo, R. V., & Bakri, M. R. (2025). Impact of Fiscal Transfers and Local Revenue Accountability on Community Welfare in Indonesia. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol 9(2).

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). RPJMN 2025-2029: Fondasi awal wujudkan visi Indonesia Emas 2025. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: ANDI

Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. World Development, 31(9), 1597–1616.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. New York: Mc Graw-Hill.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. In Journal of Economic Literature: Vol. XXXVII.

Pangestuti, A. F., Wibowo, H, Fakhruddin I., & Santoso, S. E. B. (2024). The Effect of Capital Expenditure, Balancing Funds, and Special Financial Assistance (BKK) on The Welfare of the People of Central Java Post Covid-19 (2020-2022). East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR), Vol. 3(1), 27–40.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71.

Runtunuwu. P. C. H, Mazelan, N. A., & Rajasekera, J. (2023). Analysis of Government Funding Performance on Economic Growth and Human Development Index in Indonesia. Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Vol. 18(2).

Saputro. N. R., Witono. B. (2023). PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, PENDIDIKAN, DAN TEKNOLOGI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2018-2020). ECONOMIE, 2(2).

Tarumingkeng. W. A., Rumate. V. A., Rotinsulu. T. O. (2018). Pengaruh Belanja Modal Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol 19(2).

Todaro, M. P., Smith, S. C. (2006). Economic development (9th ed). Pearson Addison Wesley.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23.

United Nations Development Programme, (1990), Human development report 1990. Oxford University Press.

Wijaya, S. D., & Rahardjo, S. N. (2023). Pengaruh desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada kab/kota di Provinsi Jawa Tengah) (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Diponegoro, Semarang.